

BAB II

DINAMIKA DAN KONSEP PARIWISATA HALAL: PERSPEKTIF GLOBAL DAN DOMESTIK

Pada bab ini, penulis akan membahas secara lebih mendalam bagaimana dinamika diplomasi pariwisata halal secara universal dimulai dari historis hingga sekarang. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait variabel pariwisata halal, serta menghindari miskonsepsi, penulis juga akan menyajikan konsep-konsep penting untuk memahami pariwisata halal berdasarkan parameter atau standar internasional. Selanjutnya, juga akan diperkenalkan lebih lanjut bagaimana dinamika pariwisata halal di Indonesia mulai dari sisi historis dan progresivitas dan praktik pariwisata halal di Indonesia saat ini, hingga gambaran umum kawasan pariwisata halal Indonesia. Pada sub-bab akhir, penulis akan menyajikan gambaran pariwisata halal pada daerah Sumatera Barat untuk memahami *positioning* sehingga menjadi *turning point* untuk diteliti lebih lanjut pada bab pembahasan nantinya.

2.1 Dinamika Pariwisata Halal

Pariwisata berbasis halal pertama kali diperkenalkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 1967. Pada waktu itu tengah dilaksanakan konferensi yang mengangkat tema “Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations”. Semenjak pengenalan tersebut, dan seiring berjalannya waktu segmen dari wisata ini berbasis halal tidak hanya sebatas agama tertentu sehingga mulai diterapkan nilai yang lebih nilai universal. Bentuk pariwisata di masa kini turut mencampurkan dengan variabel lain misalnya nilai edukasi serta nilai kearifan lokal juga tidak

ditinggalkan (Andriani, 2015).

Progresivitas *halal tourism* yang terstandarisasi mulai terjadi pada tahun 2008 yang diinisiasikan oleh CrescentRating perusahaan konsultan dan penilai yang fokus pada pasar pariwisata halal. Perusahaan ini kemudian mengeluarkan *The Global Muslim Travel Index* (GMTI) yang menjadi sebuah tolak ukur dalam sektor Pariwisata Halal yang menyediakan wawasan, data, dan pedoman yang komprehensif dan terkini hingga menjadi instrumen penting dalam membentuk industri Pariwisata Halal bagi negara-negara di seluruh dunia. Indeks ini terus berkembang dan juga mengeluarkan laporan tahunan mengenai *update framework* terbaru pariwisata halal, perangkingan negara, dan sebagainya yang rutin dilakukan tiap tahun hingga pada tahun 2023 ini (Bahardeen, 2023).

Makin maju dan berkembangnya eksistensi pariwisata halal ini juga berpengaruh pada pandangan publik terkait konsep wisata halal. Konsep pariwisata halal dianggap tidak hanya terbatas pada kunjungan pada masjid masjid maupun kuburan saja tetapi juga mencakup wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang dengan prinsip dan nilai Islam (Alfawi Ridho Subarkah, 2018). Untuk memahami konsep pariwisata halal, berdasarkan tulisan dari Hamzah dan Yudiana (2015) terdapat penjabaran tabel di bawah ini yang membedakan pariwisata halal, dengan pariwisata lainnya.

Tabel 2. 1 Perbedaan wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah

No.	Aspek	Wisata Konvensional	Wisata Religi	Wisata Syaria'ah/Halal
1	Obyek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan Sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spritualitas	Meningkatkan spritualitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan Menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi Masyarakat dan Lingkungan Obyek Wisata	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	Setiap waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber : *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects* (Jaelani, Ann)

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, pengertian wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang kemudian lebih lanjut juga dibahas *World Tourism Organization* (WTO). WTO membahas mengenai konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non-muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Oleh karena itu, jika berbicara mengenai segmentasi pasar, produk dan jasa berbasis syariah ini tidak hanya untuk kaum muslimin, namun

juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat dan mengangkat gaya hidup bagi setiap kalangan tidak hanya non-muslim (Ramli, 2011). Perbedaan yang bisa disoroti juga dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang tidak eksis dilakukan pada saat wisata berlangsung seperti perjudian, makanan mengandung babi, minuman beralkohol, hingga pesta yang jauh dari nilai syariat Islam. Sebaliknya, agenda pada pariwisata halal lebih banyak pada wisata kunjungan ke masjid-masjid, situs Islami lainnya.

Selain daripada itu, produk-produk wisata berbasis syariah yang disediakan juga kunjungan aktivitas seperti tempat belanja, taman hiburan, kunjungan kota-kota, wisata alam. Begitu pula dengan akses penginapan seperti hotel dan resort berbasis syariah yang tidak memberikan minuman beralkohol, makanan haram dalam syariat islam lainnya, ataupun juga akses seperti tempat dan jadwal sholat, tanda arah kiblat di kamar, kolam renang dan spa dan fasilitas umum lainnya yang memisahkan konsumen perempuan dan laki-laki, hingga pada transportasi juga sesuai syariah yang tidak menawarkan makanan haram sesuai syariat islam (Alfawi Ridho Subarkah, 2018).

Sebagai gambaran lebih jelas lagi terkait apakah sebuah daerah dapat dikatakan sebagai kawasan mendekati konsep pariwisata halal Indeks Perjalanan Muslim Global (GMTI) menjadi indikator yang dipakai oleh Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan daerah destinasi pariwisata. Proses penilaian ini, unit yang akan dinilai secara objektif adalah provinsi. Saat ini Kementerian Pariwisata memilih sepuluh provinsi yang dinilai berdasarkan GMTI, kemudian indikator penilaian di Indonesia juga berkembang model penilaian baru dari

global yang dinamakan Indeks Pariwisata Muslim Indonesia (IMTI). Model ini memperhatikan empat indikator yaitu: aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Furqan, 2019):

- 1) Aksesibilitas dilihat dari fungsi dari jarak dari pusat-pusat destinasi yang dituju, sehingga mudah untuk dicapai yang dapat diukur dari jarak yang ditempuh, waktu yang dibutuhkan, atau biaya yang terlibat. Komponennya secara lebih lanjut mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti akses udara, kereta api dan laut, infrastruktur jalan.
- 2) Komunikasi : Komponen ini mempertimbangkan kriteria seperti : panduan wisatawan muslim, pendidikan bagi pemangku kepentingan, jangkauan pasar, keahlian bahasa pemandu wisata, serta pemasaran digital.
- 3) Lingkungan : Komponen ini meliputi indikator-indikator, kedatangan wisatawan domestik dan internasional, komitmen pemerintah terhadap pengembangan wisata halal.
- 4) Layanan : Komponen ini meliputi : rumah makan, fasilitas bandara, penginapan, ketertarikan turis, situs budaya, hingga informasi mengenai turis.

2.2 Dinamika Pariwisata Halal Indonesia

Perkembangan konsep pariwisata berbasis nilai syariah di Indonesia tergolong relatif baru. Inisiatif yang dikembangkan global ini pada awalnya dilihat berbagai pihak akan membatasi wisatawan non-Muslim bahkan para menteri

pariwisata kurang setuju dengan konsep ini. Tidak hanya itu, istilah perjalanan islami juga dianggap tidak pantas, terlalu eksklusif dan terlihat bias pada agama tertentu. Penggunaan istilah halal atau syariah juga sempat mengalami penolakan karena dekat dengan radikalisme sitasi kajian tertentu. Namun, tidak bisa dipungkiri pariwisata halal sudah menjadi salah satu prospek ekonomi global yang menjanjikan di masa depan. Itulah mengapa perkembangan pariwisata halal terus berjalan dan berkembang hingga saat ini yang dimulai dapat *launching* pertama kali pariwisata halal 2012 hingga menjadi salah satu destinasi pariwisata terbaik. Secara lebih terperinci *timeline* perkembangan pariwisata halal di Indonesia dapat terlihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2. 2 Perkembangan Sejarah Pariwisata Halal Indonesia

No.	Year	Halal tourism trajectories
1.	1975	• Establishment of Indonesian Ulama Council - <i>Majelis Ulama Indonesia</i> (MUI).
2.	2012	• Soft launched of <i>Shariah Tourism</i> . • <i>Shariah</i> tourism guidelines book launched.
3.	2013	• Global Halal Forum Wonderful Indonesia as Muslim Friendly Destination • <i>Shariah</i> Tourism Grand launching
4.	2014	• Ministry of tourism identifies <i>shariah</i> tourism destinations • Halal products assurance law was passed
5.	2015	• Indonesia won three awards in World Halal Travel Award in Dubai • Launched Muslim Visitor Guides in English and Arabic • Embarked on a Destination Marketing project to promote Indonesia with HalalTrip via influencer marketing and blog articles and video.
6.	2016	• Halal Tourism Acceleration & Development Team within Ministry of Tourism was established Criteria and decision for Halal Tourism Destination development • Indonesia won 12 of 16 World Halal Tourism Awards.
7.	2017	• New Halal Products Certification Agency (<i>Badan Penyelenggara Jaminan Produk, BPJPH</i>) was formed.
8.	2018	• Launch of Indonesia Halal Tourism Expo

Sumber : Modified from Indonesia Muslim Travel Index (2018)

Perkembangan pariwisata halal terlihat sangat menjanjikan dengan karakteristik potensi alam yang bagus dan luas dengan 17.100 pulau, keragaman budaya dengan 742 bahasa, dan menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak yaitu sebanyak 88%. Tidak hanya itu, pariwisata halal menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan segmentasi pariwisata paling progresif dengan proyeksi pada 2020 kontribusi halal memiliki target memberikan 35% atau sekitar 300 juta dolar ke sektor ekonomi global (Ferdiansyah, 2020). Potensi ini juga terefleksi dari *positioning* pariwisata halal Indonesia di kancah internasional yang sangat baik, yaitu menjadi pariwisata terbaik kedua dunia berdasarkan berdasarkan the global travel muslim index (GMTI) 2022 (Mastercard-Crescentrating, 2022).

Saat ini, terdapat dua institusi yang sudah melakukan kerja sama dalam menciptakan wisata syariah di Indonesia, yaitu MUI dan Kemenparekraf. MUI memiliki peran sebagai pihak yang terlibat pada proses sertifikasi produk berbasis syariah, hingga memandu wisata syariah apa saja yang akan disertifikasi. Ini berarti, MUI bertindak dalam mempersiapkan parameter standarisasi syariah. Tidak hanya itu, peran dari MUI juga turut dalam mengawasi produk-produk wisata syariah, sebagai konsultan, hingga melakukan pendampingan, pembinaan manajemen aspek-aspek kesyariahan, menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktikal pariwisata syariah, serta memastikan Biro Perjalanan, Pemandu Wisata, makanan, restoran, semuanya berbasis syariah. Semua langkah yang telah dilakukan ini, kemudian akan

diteruskan oleh Kemenparekraf yang merupakan lembaga promosi wisata syariah (Awafi Ridho Subarkah et al., 2020).

Adapun pembahasan lebih lanjut tentang sertifikasi halal, yang membahas aspek makanan serta minuman halal yang menjadi kebutuhan utama bagi para wisatawan muslim, juga sudah terdapat payung hukumnya yang terdapat pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga lebih lanjut memiliki wewenang dalam aspek sertifikasi halal pada berbagai produk seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, restoran dan lain-lain (UU No.33 Tahun 2014). Tidak sampai disana, Majelis Ulama Indonesia saat ini, tengah membuat sistem QR Code Scanner halal pada restoran sebagai upaya untuk mendeteksi keaslian dari sertifikasi halal di restoran. Informasi yang didapatkan pada sistem ini dapat memuat nama restoran/outlet, siapa pemegang dari sertifikat, masa berlaku sertifikasi, hingga nomor sertifikat. Semua ini terintegrasi pada sebuah sistem yang langsung terkoneksi pada database dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Progresivitas langkah-langkah regulasi hingga integrasi dengan teknologi yang tengah diupayakan oleh pemerintah Indonesia ini juga sejalan dengan pengembangan destinasi pariwisata halal. Indonesia, mempunyai *Halal Park* yang berlokasi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Daerah ini, merupakan salah satu destinasi halal di Indonesia dengan luas kawasan ini 21.000 m² dan mempunyai nilai investasi kurang lebih Rp. 250 Miliar. Pada daerah ini,

menampilkan bermacam jenis produk halal mulai dari makanan dan minuman halal, busana, serta lainnya (Presiden RI, 2019). Selain itu, di aspek fasilitas ibadah, contohnya masjid maupun mushalla di Indonesia telah menyebar di berbagai tempat. Bersumber dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Direktorat Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama Islam Republik Indonesia terdapat kurang lebih 258.334 Masjid dan 295.626 Mushalla yang tersebar di berbagai daerah (Kementerian Agama RI, 2019). Namun, jumlah tersebut hanyalah masjid dan mushalla yang sudah terdaftar di Kementerian Agama RI, masih ada banyak masjid dan mushalla yang belum terdaftar. Lebih lanjut, Untuk memudahkan wisatawan Muslim, Dewan Masjid Indonesia juga turut mengembangkan aplikasi Dewan Masjid untuk mendeteksi masjid atau mushola terdekat, serta menampilkan kegiatan pengurus masjid (Dewan Masjid Indonesia, 2019).

Sementara itu, untuk destinasi wisata yang dapat dikunjungi wisatawan Muslim ke Indonesia terdapat beberapa daerah unggulan yang dapat dikunjungi seperti Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Malang Raya, Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. (Kementerian Pariwisata RI, 2019a). Beberapa daerah tersebut sudah sesuai dengan konsep wisata halal yaitu pariwisata yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam yang terstandarisasi global. (MasterCard & CrescentRating, 2016:7; Organisasi Kerja sama Islam, 2017:4). Tiga daerah yakni Lombok, Sumatera Barat dan Aceh menjadi daerah yang paling potensial untuk mengembangkan konsep ini (Awafi Ridho Subarkah et

al., 2020).

Kondisi pariwisata halal di Indonesia yang potensial tentu saja dapat menjadi salah satu instrumen diplomasi, yang dapat termanifestasi dari beberapa bentuk diplomasi. Pertama, kehadiran Raja Salman dari Arab Saudi menginisiasikan dan menyepakati beberapa kerja sama sekaligus sebagai aktor *endorser* untuk menarik pasar Timur Tengah. Selain itu, terlihat dari partisipasi Indonesia dalam *Malaysia International Halal Showcase* 2019 dalam rangka melakukan *branding* dan memperkenalkan lebih banyak mengenai wisata halal Indonesia di Asia Tenggara. Upaya lain juga dapat dilihat dari upaya Kementerian Pariwisata RI melakukan *Familiarization Trip (Fam Trip)* mengajak warga negara Luar Negeri ke daerah potensial pariwisata halal di Indonesia seperti ajakan agens wisata asal Timur Tengah seperti Mesir, Arab Saudi, Iraq, Oman, Yaman, Tunisia, Libya, berkunjung ke Lombok dan Bali pada tahun 2016, mengajak influencer dan jurnalis Timur Tengah ke Malang, Bali dan Lombok pada tahun 2019, hingga kerja sama dengan *Association of Sales Travel Indonesia* yaitu mengundang agen perjalanan asal Oman untuk menikmati wisata Sumatera Barat pada tahun 2018 (Awafi Ridho Subarkah et al., 2020).

2.3 Dinamika Pariwisata Halal Sumatera Barat

Sumatera Barat mulai *concern* dengan wisata halal pertama kali dapat dilihat pada tahun 2014, yang ditandai dengan berlangsungnya FGD (*Forum Groups Discussion*) di Sumatera Barat yang kemudian diikuti dengan sosialisasi yang terus dilakukan berkelanjutan (Handoyo, 2019). Kemudian, secara

pelaksanaan juga ditandai dengan adanya inisiasi dari Kepala Daerah Sumatera Barat dan jajarannya, selalu melakukan sosialisasi terkait pariwisata halal terhadap seluruh masyarakat, yang juga ditunjukkan oleh DPRD Sumatera Barat dengan memasukkan peraturan pariwisata halal (Rebecha Prananta, 2017). Lebih lanjut, pada tahun 2020, maka terbitlah Perda Pariwisata Halal No.1 Tahun 2020, yang kemudian disusul pada tahun 2022, dengan terbitnya Peraturan Gubernur No.19 tahun 2022, yang membahas tentang Pelaksanaan Perda No.01/2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal (Çimen et al., 2020)

Progresivitas program pariwisata halal di Sumatera Barat juga dapat dilihat dari makin banyak nya keterlibatan stakeholder terkait seperti dibentuknya kepengurusan Perkumpulan Pariwisata Halal di Sumatera Barat yang datang dari anggota pelaku pariwisata halal seperti pemilik hotel, praktisi pariwisata, pemilik travel, SPA, oleh-oleh dan sebagainya. Hal ini kemudian juga membuat masyarakat sadar dan mulai mengikuti aspek-aspek penting sesuai indikator pariwisata halal global salah satunya bagi para pengelola hotel dan restoran terkait sertifikat Halal restoran sesuai UU No. 33 tahun 2014 (semua produk olahan, baik makanan, minuman, pakaian, peralatan, harus disertifikasi halal). pada konteks masyarakat pun juga dapat dilihat dengan timbulnya kesadaran dari pengelola desa wisata untuk menyiapkan destinasi lebih sehat islami (Awafi Ridho Subarkah et al., 2020).

Perkembangan pariwisata ini, pada akhirnya berbuah hasil dengan berbagai penghargaan yang diperoleh mulai dari tahun 2016 Sumatera Barat mendapatkan penghargaan, yaitu pertama sebagai *Best Halal Destinasi*, *Best*

Culinary, yaitu Rendang dalam acara WHTA (*World Halal Tourism Award*) di Abu Dhabi-Uni Emirat Arab, meraih *Best Tour Operator* dalam acara WHTA (*World Halal Tourism Award*). Kemudian pada tahun 2019 Sumatera Barat meraih Urutan ke-5 Wisata Halal versi IMTI (Indonesia Muslim Travel Index). hingga per 2024 saat ini posisi Sumatera Barat naik menjadi 3 besar pariwisata halal berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index (Mastercard-CrescentRating, 2023). Peringkat Sumatera Barat dapat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 IMTI 2023 Rankings

Province	IMTI 2023 Score	IMTI 2023 Rank
Nusa Tenggara Barat	67	1
Aceh	63	2
Sumatera Barat	62	3
DKI Jakarta	60	4
Jawa Tengah	59	5
Jawa Barat	56	6
DI Yogyakarta	53	7
Jawa Timur	52	8
Sulawesi Selatan	51	9
Kalimantan Selatan	49	10
Riau	48	11
Kepulauan Riau	43	12
Kepulauan Bangka Belitung	42	13
Banten	41	14
Sumatera Selatan	34	15

Sumber : Mastercard-CrescentRating (2023)

Gambaran pariwisata halal Sumatera Barat dapat dilihat pada berbagai aspek seperti misalkan akses tempat ibadah di Sumatera Barat. Untuk Akses

ibadah terdapat kurang lebih 4561 masjid yang tersebar di kota/kabupaten. Beberapa masjid juga menjadi daya tarik pariwisata yang banyak dikunjungi, beberapa diantaranya adalah seperti Masjid Raya, Masjid Jami, Masjid Besar, berdasarkan data dari Sistem Informasi Masjid, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kementerian Agama RI, 2019).

Selain itu, untuk fasilitas kuliner halal, instansi pemerintahan provinsi Sumatera Barat sudah melakukan berbagai upaya kolaborasi dengan lembaga terkait dalam rangka memberikan sertifikasi halal terhadap produk UMKM serta tempat makan. Hal ini termanifestasi dari adanya kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan LPPHOM MUI, Yayasan Minangkabau/Minangkabau World Foundation, serta Universitas Andalas, Padang (Majelis Ulama Indonesia, 2019). Pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Sumatera Barat telah memberikan rekomendasi 22 rumah makan dan restoran yang telah memenuhi sertifikasi halal untuk memberikan layanan bagi wisatawan Muslim. Kedepannya juga memiliki target target rumah makan dan restoran yang bersertifikasi halal dapat mencapai 47 tempat (Putra, 2019).

Selanjutnya, untuk tempat pilihan wisata halal Sumatera Barat, yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Beberapa yang menjadi rekomendasi yaitu Danau Maninjau, panorama danau ini, ditempuh dengan melalui Kota Bukittinggi dengan jarak sekitar 36 kilometer; jarak 140 km dari Padang; dan jarak 27 km Lubuk Basung; Danau Kembar yakni Danau Ateh dan Danau Bawah, dengan lokasi sekitar 47 km dari Kabupaten Solok, dan dari Kota Padang sekitar 56 kilometer. Tepat nya lokasi Danau Kembar ini di Kabupaten

Solok, Kecamatan Lembayang Jaya, Desa Pasar Simpang. Selain itu, juga terdapat beberapa pulau indah yang dapat dikunjungi seperti misal Pulau Sikuai yang dapat diakses melalui Dermaga Airud Bungus yang jaraknya 1,6 km dari padang, Pulau Cubadak yang merupakan bagian dari Mandeh terletak di Pesisir Selatan yang juga menyediakan 13 bungalow untuk menginap. Akses menuju ke tempat tersebut dapat menggunakan motor boat, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu *diving*, *snorkeling*, maupun memancing. Keindahan dari Lembah Anai juga menjadi sebagai salah satu maskot kota Padang bahkan Sumatera Barat ini menyuguhkan keindahan panorama alam, beberapa tempat ikonik lainnya juga Jembatan Siti Nurbaya, yaitu jembatan yang menjadi penghubung antara Kota Tua Padang dan Taman Siti Nurbaya, yang memiliki nilai historis dari cerita populer Siti Nurbaya (Viva.co.id, 2016).

Untuk melihat gambaran persebaran dari destinasi wisata halal Sumatera Barat yang dapat dikunjungi pada daerah Sumatera Barat juga dapat melihat gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1 Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Halal Sumatera Barat

Sumber : *Template* Memandu Muslim Traveler Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020)

Daya tarik karakteristik pariwisata halal yang sangat baik ini juga berbanding lurus dengan trend kenaikan jumlah turis wisatawan asing dalam pariwisata dari tahun ketahun. Lebih lanjut data pengunjung wisata Sumatera Barat secara lebih komprehensif dengan penjabaran pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata (DTW) Berbayar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2021 -2023

Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata (DTW) Berbayar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang)		
	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	318	5	14
Kab. Pesisir Selatan	354297	212881	1316340
Kab. Solok	703300	555943	1669161
Kab. Sijunjung	60533	121613	241236
Kab. Tanah Datar	340363	642717	1108151
Kab. Padang Pariaman	100144	243283	227131
Kab. Agam	509428	82254	58410
Kab. Lima Puluh Kota	624155	749034	630226
Kab. Pasaman	11812	20175	13875
Kab. Solok Selatan	61199	151909	93521
Kab. Dharmasraya	54908	126596	178499
Kab. Pasaman Barat	23503	433405	391999
Kota Padang	376534	286093	1199833
Kota Solok	181154	100373	217252
Kota Sawahlunto	91027	140986	254396
Kota Padang Panjang	215073	261044	254985
Kota Bukittinggi	748074	1231306	1161812
Kota Payakumbuh	77747	48384	35181
Kota Pariaman	252317	209003	2182157
Provinsi Sumatera Barat	4785886	5617004	11234179

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/16/312/1/kunjungan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>

Berdasarkan data BPS di atas, total kunjungan wisatawan di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan dari 4.785.886 pada tahun 2021 menjadi 11.234.179 pada tahun 2023. Ini menunjukkan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu dua tahun. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, mencapai puncak pada 2023.

Berdasarkan gambaran dan dinamika pariwisata halal di atas secara global dan domestik terlihat bagaimana perkembangan pariwisata halal sangat progresif. Perkembangan pariwisata halal secara global menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dalam sepuluh tahun terakhir, konsep pariwisata syariah yang awalnya terbatas pada wisatawan muslim kini telah berkembang menjadi pariwisata halal yang inklusif untuk semua kalangan. Transformasi ini didukung oleh adanya standarisasi yang jelas melalui Global Muslim Travel Index, yang menjadi acuan bagi negara-negara yang ingin mengembangkan pariwisata halal. Pertumbuhan segmen pariwisata ini sangat progresif, dengan proyeksi kontribusi sektor halal mencapai 35% atau sekitar 300 juta dolar pada ekonomi global tahun 2020.

Di Indonesia, dinamika pariwisata halal juga menunjukkan perkembangan pesat. Pemerintah telah secara massif mengimplementasikan strategi pengembangan pariwisata halal, mulai dari sertifikasi halal untuk setiap daerah hingga penunjukan daerah potensial untuk fokus pada pariwisata halal. Keseriusan ini diakui secara internasional dengan penghargaan sebagai destinasi

pariwisata halal terbaik di dunia. Pada skala domestik, Sumatera Barat menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam pariwisata halal. Peningkatan peringkat sebagai destinasi halal terbaik di Indonesia, penghargaan internasional, serta peningkatan jumlah wisatawan dalam beberapa tahun terakhir menegaskan kesuksesan ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam strategi diplomasi pariwisata halal yang diterapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat. Strategi ini tidak hanya mengeksplorasi pariwisata halal sebagai alat diplomasi, tetapi juga bagaimana kearifan lokal, yaitu adat basandi syara, syara basandi kitabullah, menjadi variabel penting dalam membangun citra pariwisata halal yang kuat di Sumatera Barat.